

**PERKEMBANGAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI (RUANG LINGKUP PENETAPAN
TERSANGKA) STUDY KASUS PERKARA
NOMOR. 22/PID.PRAP/2017/PN. JAKSEL
ATAS NAMA PAHALA TUA, SOS, MM**

ENDI SULISTIYO

ABSTRAK

Perkembangan lembaga praperadilan khusus untuk penetapan tersangka adalah merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya mempunyai motivasi atau tujuan tertentu yaitu untuk melindungi kepentingan hukum dari tersangka. Lembaga praperadilan berfungsi sebagai pengawasan yang bertujuan agar penegak hukum khususnya para penyidik Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun Penuntut Umum Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berbuat dan bertindak sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa ditingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, ataupun lembaga praperadilan adalah untuk kepentingan penggunaan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, disamping itu pengajuan lembaga praperadilan ini merupakan penegakan hukum dalam mencari dan melaksanakan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis terhadap putusan-putusan praperadilan baik sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 25 April 2015 yang telah memperluas objek Praperadilan yakni penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan maupun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi selain itu juga untuk memformulasikan bentuk-bentuk 2 (dua) alat bukti dalam penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik, baik Penyidik KPK, Kejaksaan dan Polri sehingga 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dapat diterima oleh Hakim praperadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui Arus gelombang praperadilan merupakan cara baru dalam proses penegakan hukum yang berdampak pada dua sisi, disatu sisi sebagai kontrol dan intropeksi atas penyimpangan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum sedangkan disisi lain sebagai upaya tersangka menghindari dari pemeriksaan pokoknya, oleh karena itu diharapkan para penegak hukum khususnya penyidik Kejaksaan dapat mempersiapkan diri melalui terobosan-terobosan hukum sepanjang terobosan hukum itu tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima oleh Hakim Praperadilan. Saat ini perkara Pahala Tua, Sos, MM, perkara pokoknya sedang berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta.

Kata Kunci : Korupsi, Penegakan Hukum, dan Praperadilan.

**DEVELOPMENT OF PREVENTION OF CRIMINAL ACTIONS
OF CORRUPTION (SCOPE OF SUSPECTED APPROPRIATION)
CASE STUDY NUMBER 22 / PID.PRAP / 2017 / PN.
JAKSEL THE NAME OF PAHALA
TUA, SOS, MM**

ENDI SULISTIYO

ABSTRACT

The development of pretrial institutions specifically for the determination of suspects is a new thing in the life of criminal law enforcement in Indonesia, of course have a certain motivation or purpose that is to protect the legal interests of the suspect. Pretrial institutions serve as supervisors with a view to enforcing law enforcement, especially the investigators of the Police, Attorney and Corruption Commission or Prosecutor General Prosecutor and Corruption Eradication Commission does not act and act arbitrarily against suspects or defendants at investigation and prosecution, or pretrial institutions are to the interest of the use of the protection of the rights of suspects or defendants, in addition to this pre-trial pretrial application is a law enforcement in seeking and implementing legal certainty that is related to justice and truth. The purpose of this study was to identify and analyze pretrial decisions well before the decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 dated 25 April 2015 which has expanded the object of Pretrial namely the determination of suspects, searches and seizures and after the decision of the Constitutional Court and also to formulate 2 (two) forms of evidence in the determination of suspects conducted by the Investigator, both the Provider of KPK, the Attorney and the Police, so that 2 (two) evidences to determine if a suspect can be accepted by the Pretrial Judge. The method used in this study is normative juridical, used to examine / analyze data in the form of legal materials, especially primary materials and secondary materials. The conclusion of the results of this study is known Pretrial wave is a new way in the law enforcement process that impact on two sides, on the one hand as a control and introspection of the irregularities of the act of forced attempts by law enforcers while on the other hand as a suspect attempt to avoid the principal examination, by because it is expected that law enforcers, especially prosecutors investigators can prepare themselves through legal breakthroughs as long as the law breakthrough is not contrary to the law and can be accepted by the Judge of Pretrial. Currently, Pahala Tua case, Sos, MM, the main case is running in the Corruption Court in Jakarta.

Keywords: Corruption, Law Enforcement, and Pretrial.